



PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUN MANUSIA DI DIY

Nurna Pratiwi
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
(Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021)

Abstract

This study aims to examine the effect of regional financial independence and economic growth on the Human Development Index in Districts/Cities in Yogyakarta Province in 2014-2019. This study uses secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics and the website of the Ministry of Finance. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results show that financial independence and economic growth simultaneously have a significant effect on the Human Development Index. Partially, regional financial independence and economic growth also have a positive and significant effect on the Human Development Index in Districts/Cities in Yogyakarta Province in 2014-2019.

Keywords: *Regional Financial Independence, Economic Growth, and Human Development Index.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik maupun website Departemen Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk

mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan

kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wuku, 2015). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah sehingga memungkinkan kemandirian keuangan daerah bagi daerah Kabupaten/Kota (Firda,

2014). Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 (dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	158.623	187.802	180.273	221.215	211.047	226.191
Bantul	813.917	857.098	404.454	369.224	462.653	448.854
Gunungkidul	159.304	145.856	206.278	192.374	227.299	228.329
Sleman	577.380	577.585	717.151	698.754	894.272	867.643
Yogyakarta	470.634	449.849	540.504	511.132	667.493	636.084

Sumber: Data BPS diolah.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata PAD Kabupaten/Kota di DIY setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan nilai PAD tersebut. Menurut Halim (2001) menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan Pemerintah Daerah menjadi lebih besar. Daerah yang mandiri berarti daerah mampu

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menciptakan pembangunan manusia (Siregar, 2017).

Peningkatan pembangunan daerah tentunya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan suatu daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat ber-

tambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun ke tahun. Menurut Putu (2014), wilayah dengan PDRB tinggi, belum tentu memiliki IPM yang tinggi pula sebaliknya wilayah dengan tingkat IPM rendah belum tentu tingkat PDRB daerah tersebut juga rendah.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2014-2019 (dalam miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	6.004	6.282	6.581	6.973	7.730	8.773
Bantul	14.851	15.589	16.376	17.210	18.151	19.155
Gunungkidul	10.640	11.152	11.696	12.282	12.915	13.603
Sleman	26.713	28.098	29.563	31.141	33.139	35.290
Yogyakarta	21.308	22.393	23.536	24.768	26.129	27.685

Sumber: Data BPS diolah.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2019 terjadi peningkatan PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Peningkatan PDRB tersebut memberikan indikasi bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di DIY berhasil menjalankan otonomi daerah dan juga keberhasilan pembangunan

daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia sebagai tujuan dari pembangunan daerah dapat terlihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup

(Longevity), pengetahuan (Knowledge) dan standar hidup layak (Decent Living). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Tabel 3 di bawah ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2014-2019

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	70,68	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44
Bantul	77,11	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01
Gunungkidul	67,03	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96
Sleman	80,73	81,20	82,15	82,85	83,42	83,85
Yogyakarta	83,78	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65

Sumber: Data BPS diolah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019; 2) untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019; 3) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DIY tahun 2014-2019.

II. METODE PENELITIAN

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data berupa laporan realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Yogyakarta tahun anggaran 2014-2019, data PDRB dan data IPM. Data diambil dari www.djpk.depkeu.go.id serta data statistik BPS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan

Daerah. Persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

.....
..... (1)

Keterangan :

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
 X_1 = Kemandirian Keuangan Daerah
 X_2 = Pertumbuhan Ekonomi
 α = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien Regresi
 e = error

III. HASIL PENELITIAN

Kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kecilnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat atau dengan kata lain daerah mampu membantai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan juga dapat menggambarkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian Pemerintah Daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Widodo (dalam Halim, 2007) menjelaskan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa Kota Yogyakarta mempunyai rasio kemandirian yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Kabupaten Gunungkidul memiliki rasio kemandirian rendah, hal ini berarti bahwa Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sumber pendanaan eksternal yakni dari pemerintah pusat.

Tabel 4. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2014-2019

(dalam persen)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	14,16	13,92	13,27	17,52	13,53	13,51
Bantul	19,70	20,02	20,22	23,68	20,77	20,81
Gunungkidul	11,60	12,26	12,47	14,69	12,28	11,10
Sleman	27,61	28,30	30,79	31,57	32,97	32,35
Yogyakarta	32,24	35,60	34,26	39,62	38,43	36,86

Sumber: Data BPS.

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta 2014-2019
(dalam persen)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	4,56	4,63	4,76	5,96	10,86	13,49
Bantul	5,04	4,97	5,05	5,09	5,47	5,53
Gunungkidul	4,55	4,81	4,88	5,01	5,15	5,33
Sleman	5,31	5,18	5,21	5,34	6,42	6,49
Yogyakarta	5,28	5,09	5,10	5,23	5,49	5,96

Sumber: Data BPS diolah.

Pada tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi DIY bertumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo sebesar 13,49%, dan laju pertumbuhan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,33% pada tahun 2019.

Hasil Regresi Linier Berganda

$$\begin{aligned}
Y &= 60,098 + 0,650 X_1 + 0,436 X_2 \\
Se &= (1,499) (0,037) (0,190) \\
t &= (40,07) (17,558) (2,291) \\
\text{Sig} &= (0,000) (0,000) (0,029) \\
R^2 &= 0,919 \\
F &= 154,16
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji statistik F, menunjukan bahwa nilai F-hitung sebesar 154,16 dengan nilai sig F-hitung = 0,000 < $\alpha=0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, semakin banyak yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Semakin mandiri suatu Pemerintah Daerah berarti daerah mampu mengalokasikan secara lebih efisien potensi yang ada di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonominya semaksimal mungkin (Siregar, 2017).

Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 17,558 dengan nilai sig t-hitung $0,000 < \alpha=0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel independen kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hidayahwati (2011) dan Amalia dan Bagus (2014) yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Daerah yang mandiri berarti daerah mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menciptakan pembangunan manusia. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia sebagai tujuan dari pembangunan daerah dapat terlihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Semakin mandiri suatu daerah maka diharapkan masyarakatnya semakin sejahtera. Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,291 dengan nilai sig t-hitung $0,029 < \alpha=0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mirza, 2012) dan (Setiaji,2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Putu (2014), Pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup, akhirnya menjamin kemakmuran masyarakat, meningkatkan tahap kesehatan, keharmonisan serta kesejahteraan yang berkelanjutan yang akan dapat melangsungkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena sebagian besar atau masyarakat berdominasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah, serta distribusi pendapatan cukup merata sehingga semua masyarakat merasakan dampak positif dari peningkatan pertumbuhan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai signifikan F-hitung sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019.
2. Nilai signifikan t-hitung X_1 sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019.
3. Nilai signifikan t-hitung sebesar 0,029 lebih kecil daripada 0,05 menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Firda dan Ida Bagus. 2014. "Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan

Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia". E-Jurnal EP Unud, 3[6]: 257-264.

Astuti, Wuku. 2015. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pengangguran dan Kemiskinan". STIEB BANK Vol. 6. No.1. Hal 1-18.

Ayu, Putu. 2014. "Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali". E-Jurnal EP Unud, 4 [1] : 32-40.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. www.bps.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. www.djpk.go.id

Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hidayahwati, Nurul. 2011. "Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur". Tesis. Universitas Jember.

Mirza,Sulistio,Deni 2012. "Pengaruh kemiskinan,Pertumbuhan Ekonomi,dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.

Setiaji, Rela. 2016. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Subosuka Wonosraten".

Siregar, B., & Pratiwi, N. 2017. The Effect of Local Government Characteristics and

Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(2), 65–71.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.